Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2026

LAPORAN EVALUASI RENJA TW. II

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan OPD.

Renja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peratuan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini berisikan Evaluasi Renja Triwulan I (satu), merupakan evaluasi terhadap hasil Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dapat dicapai.

Tanjungpinang, 1 Juli 2026

Plt. KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr.DARSON, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196907091992031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 5
C. Maksud dan Tujuan 9
D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah 9

BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA **11**

BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA **12**
A. Jumlah Program dan Kegiatan DPA, Renja dan Renstra 12
B. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra 14
C. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra 15
D. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja dan Renstra 16

BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA **18**
A. Capaian Target Indikator Sasaran 18
B. Capaian Target Indikator Program 19
C. Capaian Target Indikator Sub kegiatan 21

BAB V KENDALA/ PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN **24**

BAB VI PENUTUP **25**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan 10
Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 11
Tabel 3.1 Perbandingan DPA, Renja dan Renstra Tahun 2026 12
Tabel 4.1 Pencapaian Target Indikator Sasaran Hingga Triwulan I (Januari - Maret 2026)..... 18
Tabel 4.2 Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan I (Januari - Maret 2026)..... 19
Tabel 4.3 Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan I (Januari - Maret 2026)..... 20
Tabel 4.4 Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Hingga Triwulan I (Januari - Maret 2026)..... 21

Flowchart 1 Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026..... 15
Flowchart 2 Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026..... 16
Flowchart 3 Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA,Renstra, dan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026..... 17
Lampiran..... 26

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggualanan bencana, telah disebutkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang diperkuat adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Kepala BPBD dijabat rangkap (ex-efficio) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi: Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pelaksana Penanggulangan Bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunaan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/ daerah, arsip dan dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga peralatan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan,

bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dan kedaruratan, logistik dan peralatan, mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
d. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efesien;
e. Pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencanan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
f. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

h. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BPBD merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029.

Renja BPBD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh BPBD dalam satu tahun anggaran. Renja BPBD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, selain itu Renja BPBD juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah.

Program Penanggulangan Bencana berkaitan dengan misi 2 (dua) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 -2029 yaitu ‘Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah kata ‘Pelayanan’, yang berarti bahwa pemerintah daerah melalui BPBD bertanggungjawab memberikan Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar tercipta rasa aman.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalaian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibandingkan degan dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalaian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1).
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);
31. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;
32. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 104/KPTS-33/I/2026 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;
33. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 100/KPTS-33/I/2026 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;

34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 9 Tahun 2026 tetntang perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Nomor 1095);

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2026 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2026;
c. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat tentang metode evaluasi Renja Perangkat Daerah, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b. Teknik Pengolahan Data

   Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan

anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel. 1

Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Penyajian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 2

Tujuan dan Sasaran Renja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tahun 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2026
1.	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana			Indeks	108,00			
			Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip perangkat daerah (predikat)	BB
								Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusaia Perangkat Daerah (Indeks)	88
								Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,00
							Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana (indeks)	2,72
								Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Indeks)	0,29
								Indeks Pemngembangan Sistem Pemulihan Bencana (Indeks)	0,55

BAB III

PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA

Bab ini berisi tentang uraian perbandingan antara jumlah program, kegiatan dan anggaran DPA, Renja dan Renstra Tahun Anggaran 2026 Perangkat Daerah.

A. Jumlah Program dan Kegiatan DPA, Renja dan Renstra

Jumlah Program dan Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Perbandingan DPA, Renja dan Renstra Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	√	√	√
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	√	√	√
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	√	√	√
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X	X	X
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	√	√	√
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	√	√	√
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	√	√	√
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	X	√	√
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	X	√	√
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	X	√	√
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X	√	√

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	√	√	√
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	√	√
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	√	√	√
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	√	√	√
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	√
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	√	√	√
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	√	√	√
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	√	√
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	√	√	√
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√
1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	√	√	√
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	√
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	√	√	√
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	√	√	√
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	√	√	√
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	√	√	√
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	X	√	√
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	X	√	√
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	X	√	√
1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	X	√	√
1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	√	√	√
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	√	√	√
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	x	√	√
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	√	√	√

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	√	√	√
1.05.03.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provins	X	√	√
1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	√	√	√
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	X	√	√
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	√	√	√
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	X	√	√
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	√	√	√
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	√	√	√
1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.04.0015	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	X	√	√
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	√	√	√
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	X	√	√
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	X	√	√
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	√	√	√
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	√	√	√

B. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 1 berikut;

***Flowchart* 1:**

Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026

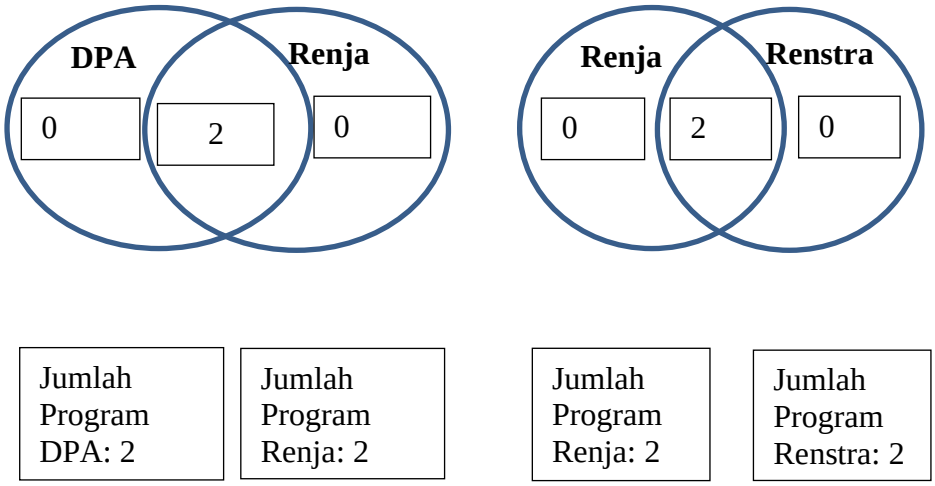

Uraian penjelasan;

Jumlah Program yang dilaksanakan BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 konsisten di mana jumlah program dalam Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sangat konsisten yaitu terdiri dari 2 (dua) Program yang sama baik nama program maupun jumlah programnya, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penanggulangan Bencana

C. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 2 berikut;

***Flowchart* 2:**

Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026

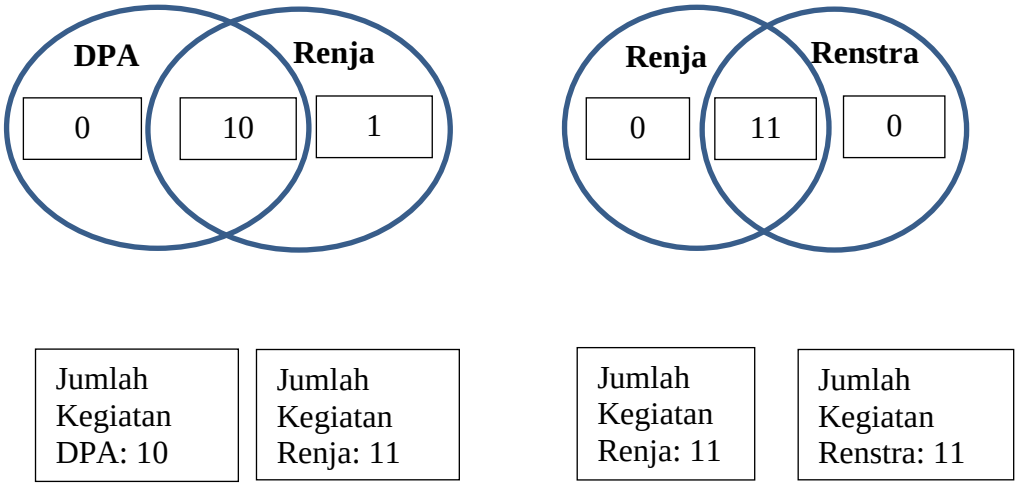

Uraian penjelasan:

Dari diagram diatas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2026 terdapat 10 (sepuluh) kegiatan, dokumen Rencana Kerja terdapat 11 (sebelas) kegiatan yang terdapat di BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, berkurangnya jumlah kegiatan di pengaruhi oleh Anggaran Belanja Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan.

Sementara itu tidak terdapat perbedaan dokumen Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 dan dokumen Rencana Strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu adanya 11 (sebelas) kegiatan.

D. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renstra, dan Renja

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA, Renstra, dan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 3 berikut;

***Flowchart* 3:**

Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA,

Renstra, dan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026

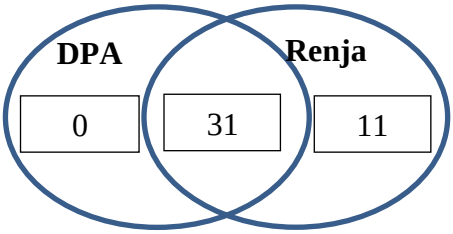

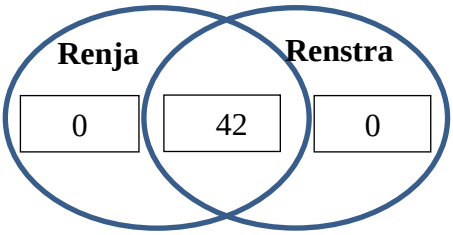

Jumlah Sub Kegiatan DPA: 31	Jumlah Sub Kegiatan Renja: 42

Jumlah Sub Kegiatan Renja: 42	Jumlah Sub Kegiatan Rentra: 42

Uraian penjelasan:

Dari *diagram* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2026 hingga Triwulan II terdapat 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dan terdapat perbedaan terhadap dokumen Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang total kegiatan dalam Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 terdapat 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, berkurangnya jumlah Sub kegiatan di pengaruhi oleh Anggaran Belanja Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan.

Sementara itu Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau dan dokumen Rencana Strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 berjumlah sama yaitu terdapat 42 (empat puluh dua) sub kegiatan.

BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA

Bab ini berisi tentang data informasi dan uraian analisis capaian kinerja sasaran, program dan sub kegiatan renja perangkat daerah.

A. Capaian Target Indikator Tujuan danSasaran

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Tujuan dan Sasaran Renja yang dievaluasi.

Tabel 4.1

Pencapaian Target Indikator Sasaran Hingga Triwulan II

(Januari – Juni 2026)

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
1.	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	108,00	0,00	0,00	SR
2.	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,47	0,00	0,00	SR

Hingga Triwulan II Tahun 2026 (data hingga 30 Juni 2026) realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran sebesar 0,00 % Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR), hal ini dikarenakan indikator sasaran tersebut dapat di hitung pada akhir tahun anggaran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

B. Capaian Target Indikator Program

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut;

Tabel. 4.2

Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan II
(Januari - Juni 2026)

No	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Realisasi TW II 2026	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	-	0,00	SR
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	88	0,00	0,00	SR
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	0,00	0,00	SR
2.	Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2.72	0,00	0,00	SR
		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,29	0,00	0,00	SR
		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,55	0,00	0,00	SR

Hingga Triwulan II Tahun 2026 (data hingga 30 Juni 2026) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tiga (3) Indikator yaitu Nilai Sakip Perangkat Daerah (penilaian oleh Inspektorat), Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (penilaian oleh BKPSDM), Indeks Kepuasan Masyarakat (penilaian oleh Masyarakat), berstatus Sangat Rendah (SR) 0,00 %, hal ini di karenan ketiga indikator tersebut belum di lakukan penilaian pada Triwulan II

Sedangkan Program penanggulangan Bencana memiliki tiga (3) Indikator yaitu Indeks Pencegahan Bencana, Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana dan Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,00 % Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR). Indikator Program Penanggujlangan Bencana dapat di hitungdan di nilai pada akhir tahun anggaran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kapasitas Daerah.

Sementara informasi dan analisis capaian realisasi anggaran program Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut

Tabel. 4.3

Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II

(Januari - Juni 2026)

No	Nama Progam	Realisasi Anggaran (%)	Status
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50,59%	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	19,91%	Sangat Rendah

Hingga Triwulan II Tahun 2026 (data hingga 30 Juni 2026) realisasi anggaran program berkategori Sangat Tinggi (ST) 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (50,59 %), dan realisasi anggaran program berkategori Sangat Rendah (SR) 1 program yaitu Program Penanggulangan Bencana (19,91 %).

Pencapaian Realisasi Anggaran pada status Sedang di karenakan serapan Anggaran hanya pada rutinitas kantor, seluruh Kegiatan selain Urusan rutin perkantoran Rencana Anggaran Kas (RAK) berada di Triwulan III dan IV, sehingga pelaksanaan kegiatan mengikuti RAK Tahun Anggaran 2026.

C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel. 4.4

Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Hingga Triwulan II

(Januari - Juni 2026)

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		Kinerja dan Anggaran Renja	
		DPA	REALISASI	Kinerja %	Realisasi %	K	R
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,068,057.50	10,733,850.00	100.00	35.70	ST	S
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,999,950.00	3,205,100.00	100.00	32.05	ST	R
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,500,000.00	6,680,800.00	100.00	32.59	ST	R
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,327,097,232.64	3,817,748,559.00	50.00	52.10	ST	ST
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	251,698,000.00	92,185,000.00	50.00	36.63	ST	S
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17,999,782.00	0.00	100.00	0.00	ST	SR
I.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,994,600.00	0.00	50.00	0.00	ST	SR
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,996,000.00	4,343,265.00	50.00	14.48	ST	R
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,999,800.00	3,910,909.00	0.00	55.87	SR	ST
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,000,000.00	600,000.00	0.00	8.57	SR	SR
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159,489,200.00	47,872,774.00	50.00	30.02	ST	R
I.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,995,500.00	150,995,500.00	100.00	100.00	ST	ST
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175,360,000.00	63,108,725.00	50.00	35.99	ST	S
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,558,600.00	518,600.00	0.00	33.27	SR	S
I.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127,508,000.00	33,600,000.00	45.45	26.35	ST	R
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,110,100.00	0.00	50.00	0.00	ST	SR
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,064,800.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						
II.1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**						
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	23,402,962.50	1,850,000.00	0.00	7.90	SR	SR

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		Kinerja dan Anggaran Renja	
		DPA	REALISASI	Kinerja %	Realisasi %	K	R
II.2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**						
1	Pengelolaan Risiko Bencana	13,422,800.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	8,628,937.93	4,874,845.00	100.00	56.49	ST	ST
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	24,998,800.00	6,570,000.00	0.00	26.28	SR	R
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	23,402,022.50	0.00	0.00	0.00	SR	SR
II.3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**						
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	14,998,000.00	4,098,000.00	50.00	27.32	SR	R
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	86,293,856.07	28,651,000.00	100.00	33.20	SR	S
3	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	62,977,172.50	34,217,300.00	50.00	54.33	ST	ST
II.4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**						
1	Penanganan Pascabencana Provinsi	112,707,000.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
2	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	7,040,000.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
3	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	9,998,302.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
4	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
5	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	8,172,400.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
JUMLAH		**8,758,661,875.64**	**4,315,764,227.00**	**43.97**	**49.27**	**T**	**ST**

Hingga Triwulan II Tahun 2026 (data hingga 30 Juni 2026) realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori Kinerja status **Sangat Tinggi (ST)** ada 15 (lima belas), yaitu 13 (tiga belas) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 2 (dua) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana. Realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori Kinerja status **Sangat Rendah (ST)** ada 16 (enam belas), yaitu 5 (lima) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 11 (sebelas) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.

Realisasi Anggaran **Sangat Tinggi (ST)** ada 5 (Lima), yaitu 3 (tiga) pada sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 2 (dua) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana, Status **Sedang (S)** ada 5 (lima) yaitu 4 (empat) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana, Status **Rendah (R)** ada 5 (lima) yaitu 4 (empat) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana Status **Sangat Rendah (SR)** ada 14 (empat belas), yaitu 6 (enam) sub kegiatan pada Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 8 (delapan) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.

Pencapaian Realisasi target indikator sub kegiatan dan Anggaran pada satatus Sangat Rendah di karenakan serapan Anggaran hanya pada rutinitas kantor, penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia – Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB V

KENDALA/ PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 (data hingga 30 Juni 2026) Tahun Anggaran 2026 dikarenakan seluruh kegiatan urusan kebencanaan belum dapat di laksanakan, kegiatan tersebut berada pada Rencana Anggaran Kas Triwulan III dan IV.

Kegiatan yang di jalankan hingga Triwulan II berakhir hanya bersifat rutinitas kantor, sehingga hampir seluruh sub kegiatan belum memperoleh hasil maksimal dan mencapai indikator yang akan di capai.

Penilaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah yang merupakan indikatur Tujuan serta Sasaran oleh BPBD Provinsi Kepulauan Riau dapat dinilai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) paling cepat dapat di Nilai pada Januari 2027, sehingga penyusunan pelaporan belum dapat di susun pada akhir Anggaran 2026.

BAB VI
PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2026 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Pada Tahun Anggaran 2026 BPBD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) Program yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Secara umum realisasi Kinerja dan Keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, hingga Triwulan II tahun 2026 akhir Juni 2026 rata-rata realisasi keuangan mencapai **49,27 %** dengan kategori **Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi Kinerja Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah dapat di hitung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) paling cepat dapat di Nilai pada Januari 2027

Demikianlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan II BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pada Tahun berikutnya. Dengan dibuatnya laporan evaluasi hasil Renja Triwulan II BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pimpinan dan staf dalam mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan ke depannya.

TTd,

Perencana Ahli Muda

LAMPIRAN

PENGUKURAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Target Triwulan				Ralisasi Triwulan		Persentase Triwulan		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas (Langkah Aksi)	Indikator	Target	Rencana Waktu Pencapaian (TW)				Realisasi Pencapaian (TW)		Anggaran Pendukung Aktivitas (Rp)	Realisasi Anggaran Pendukung Aktivitas (Rp)	Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV	I	II	I	II					I	II	III	IV	I	II				
1	2	3	4	5				6		7		8	9	10	11	12				13		14	15	16	17
1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0.47	-	-	-	0.47	-	-	-	-													Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Dr. DARSON, S.Pd, M.Si)	
												PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
												Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
												Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)													
													Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	30 Orang	-	-	30	-	-	-	23,402,962.50	1,850,000.00	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (DIAN MARTARIES PUTRA, ST., MH)	
												Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana													
												Pengelolaan Risiko Bencana													
													Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/ kota yang tertangani	1 Kegiatan	-	-	-	1	-	-	13,422,800.00	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (VENU RENDRA KRISNA, ST.,M.Eng)	
												Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana													
													Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	32 Orang	-	20	-	-	-	20	8,628,937.93	4,874,845.00	Kepala Bidang Kedaruratan, Pusdalops PB dan Logistik Peralatan (Ir. MUHAMMAD YAZID, S.T., M.T) dan PPTK (HARDIN NAFII, S.Gz)	
												Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana													
													Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	-	-	-	1	-	-	24,998,800.00	6,570,000.00	Kepala Bidang Kedaruratan, Pusdalops PB dan Logistik Peralatan (Ir. MUHAMMAD YAZID, S.T., M.T) dan PPTK (HARDIN NAFII, S.Gz)	
												Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana													
													Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/ Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	30 Orang	-	-	-	30	-	-	23,402,022.50	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (DIAN MARTARIES PUTRA, ST., MH) dan PPTK (Dr. ABDUL BASIR, S.Ag, M.Pd)	
												Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
												Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana													
													Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan	-	1	-	1	-	1	14,998,000.00	4,098,000.00	Kepala Bidang Kedaruratan, Pusdalops PB dan Logistik Peralatan (Ir. MUHAMMAD YAZID, S.T., M.T)	
												Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
													Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	120 Orang	-	40	-	-	-	40	86,293,856.07	28,651,000.00	Kepala Bidang Kedaruratan, Pusdalops PB dan Logistik Peralatan (Ir. MUHAMMAD YAZID, S.T., M.T) dan PPTK (BAYU TAUFAN, SE, M.Si)	
												Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana													
													Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	4 Laporan	0	1	0	1	1	1	62,977,172.50	34,217,300.00	Kepala Bidang Kedaruratan, Pusdalops PB dan Logistik Peralatan (Ir. MUHAMMAD YAZID, S.T., M.T)	
												Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
												Penanganan Pasca Bencana Provinsi													
													Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-	1	-	-	112,707,000.00	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (VENU RENDRA KRISNA, ST.,M.Eng)	
												Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi													
													Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	-	-	-	1	-	-	7,040,000.00	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (VENU RENDRA KRISNA, ST.,M.Eng) dan PPTK (MARDIAH, S.Sos)	
												Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan													
													Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	-	-	-	1	-	-	9,998,302.00	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (VENU RENDRA KRISNA, ST.,M.Eng)	
												Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota													
													Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	7 Kabupaten/ Kota	-	-	-	7	-	-	7,080,000.00	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (VENU RENDRA KRISNA, ST.,M.Eng) dan PPTK (MARDIAH, S.Sos)	
												Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor													
													Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	-	-	-	1	-		8,172,400.00	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (VENU RENDRA KRISNA, ST.,M.Eng)	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Target Triwulan				Ralisasi Triwulan		Persentase Triwulan		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas (Langkah Aksi)	Indikator	Target	Rencana Waktu Pencapaian (TW)				Realisasi Pencapaian (TW)		Anggaran Pendukung Aktivitas (Rp)	Realisasi Anggaran Pendukung Aktivitas (Rp)	Penanggungjawab	Ket
				I	II	III	IV	I	II	I	II					I	II	III	IV	I	II				
1	2	3	4	5				6		7		8	9	10	11	12				13		14	15	16	17
												PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
												Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
													Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	1	-	1	-	2	30,068,057.50	10,733,850.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (S. BERRYZA AMANDA, S.T)	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
													Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	1	-	-	-	1	9,999,950.00	3,205,100.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (S. BERRYZA AMANDA, S.T)	
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
													Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1	-	1	-	1	1	20,500,000.00	6,680,800.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (S. BERRYZA AMANDA, S.T)	
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
													Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	59	59	59	59	59	59	7,327,097,232.64	3,817,748,559.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S)	
												Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
													Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	-	1	-	1	-	1	251,698,000.00	92,185,000.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (S. BERRYZA AMANDA, S.T)	
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
													Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1	-	1	-	1	-	17,999,782.00	-	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (DELFIA HERLINA, S.Pd. M.A.P)	
												Administrasi Umum Perangkat Daerah													
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
													Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	-	1	-	1	-	1	14,994,600.00	-	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (DELFIA HERLINA, S.Pd. M.A.P)	
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
													Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	1	-	1	-	1	29,996,000.00	4,343,265.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (DELFIA HERLINA, S.Pd. M.A.P)	
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
													Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	1	-	-	6,999,800.00	3,910,909.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (DELFIA HERLINA, S.Pd. M.A.P)	
												Fasilitasi Kunjungan Tamu													
													Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	-	-	1	-	-	7,000,000.00	600,000.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (DELFIA HERLINA, S.Pd. M.A.P)	
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
													Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	-	1	-	1	-	1	159,489,200.00	47,872,774.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (DELFIA HERLINA, S.Pd. M.A.P)	
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
												Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
													Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2	-	-	-	2	-	150,995,500.00	150,995,500.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S)	
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
													Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	-	1	-	1	-	1	175,360,000.00	63,108,725.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S)	
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
													Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	1	-	-	1,558,600.00	518,600.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S)	
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
													Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	-	-	10	12	-	10	127,508,000.00	33,600,000.00	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (DELFIA HERLINA, S.Pd. M.A.P)	
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
													Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	-	7	-	7	-	7	7,110,100.00	-	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S) dan PPTK (DELFIA HERLINA, S.Pd. M.A.P)	
												Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
													Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	1	-	-	5,100,000.00	-	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S)	
												Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
													Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	1	-	-	12,064,800.00	-	Kepala Sekretariat (BENITO MASNURA, S.S)	
																						8,758,661,875.64	**4,315,764,227.00**		

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi Nama Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja
3. Diisi Nama Indikator Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja
4. Diisi Target sesuai Perjanjan Kinerja
5. Diisi sesuai rencana target Triwulan
6. Diisi dengan nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung sasaran
7. Diisi dengan aktivitas (langkah aksi)
8. Diisi Indikator aktivitas
9. Diisi dengan Target Output
10. Diisi Rencana Waktu Pencapaian Output
11. Diisi anggaran pendukung aktivitas yang tertuang dalam DPA
12. Diisi dengan penanggung jawab aktivitas
13. Diisi dengan keterangan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BERITA ACARA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN II TAHUN 2026

Pada Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilaksanakan Desk Pengendalian dan Evaluasi terhadap Capaian hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2026 antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rangkuman hasil desk dimaksud sebagai berikut :

1. Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Renstra Tahun 2026:

Uraian	**TW II**
Program	2
Kegiatan	11
Sub Kegiatan	42

2. Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Renja Tahun 2026:

Uraian	**TW II**
Program	2
Kegiatan	10
Sub Kegiatan	42

3. Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di DPA Tahun 2026:

Uraian	**TW II**
Program	2
Kegiatan	10
Sub Kegiatan	31

4. Kesesuaian Antara Program/Kegiatan/Sub Kegiatan didalam Dokumen Renja dengan Renstra, dan antara Renja dengan dengan DPA Tahun 2026

a. Irisan Program Triwulan II 2026

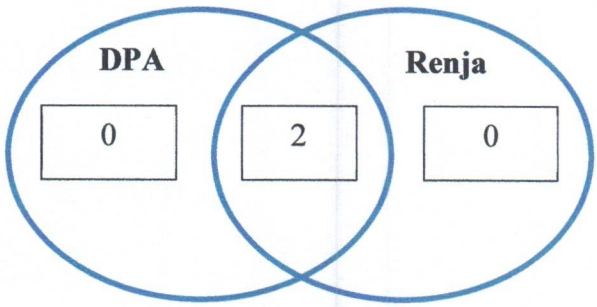

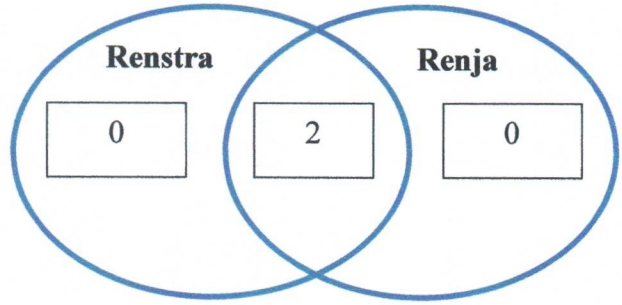

Jumlah Program DPA : 2	Jumlah Program Renja : 2	Jumlah Program Renstra : 2	Jumlah Program Renja : 2

b. Irisan Kegiatan Triwulan II 2026

c.

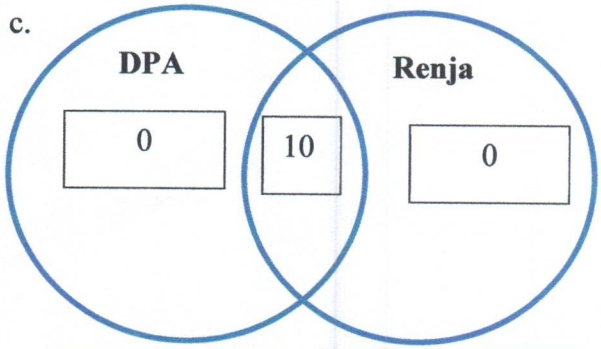

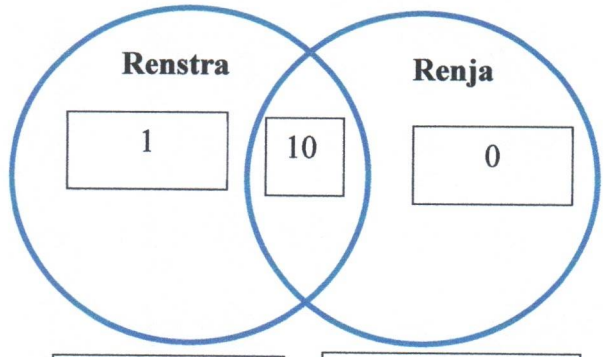

Jumlah Kegiatan DPA : 10	Jumlah Kegiatan Renja : 10	Jumlah Kegiatan Renstra : 11	Jumlah Kegiatan Renja : 10

d. Irisan Sub Kegiatan Triwulan II 2026

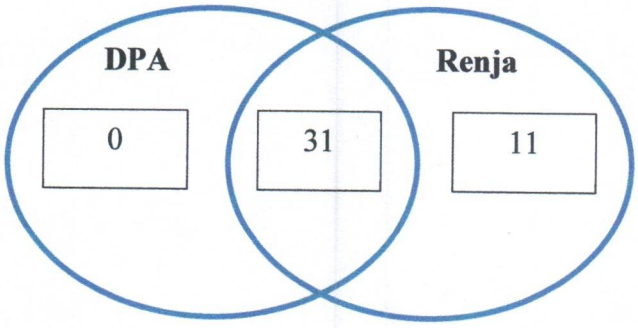

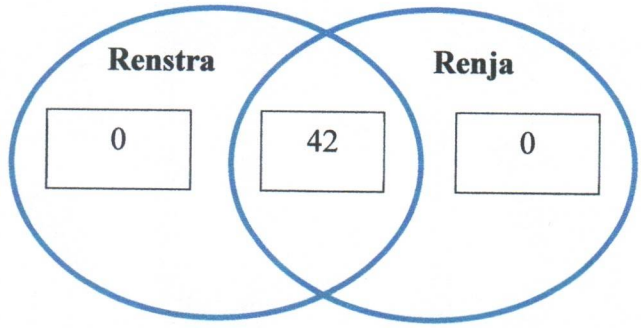

Jumlah Sub Kegiatan DPA: 31	Jumlah Sub Kegiatan Renja P : 42	Jumlah Sub Kegiatan Renstra: 42	Jumlah Sub Kegiatan Renja : 42

5. Rata-rata capaian kinerja Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah **0,00%** dengan Kategori **Sangat Rendah (SR)**
6. Rata-rata capaian kinerja Kegiatan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah **39,53%** dengan Kategori **Sangat Rendah (SR)**
7. Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2026 adalah **39,53%** dengan Kategori **Sangat Rendah (SR)**
8. Rata-rata capaian keuangan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar **49,27%** dengan Kategori **Sangat Rendah (SR)**
9. Permasalahan dalam pencapaian Target Kinerja Renja dan Keuangan:
   Permasalahan realisasi tidak tercapai sesuai target:
   1) Efisiensi anggaran setelah DPA Murni menghambat pencapaian target.
   2) Angggaran kas di letakkan di triwulan III dan III sehingga berdampak pada pencapaian realisasi TW II.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam bentuk laporan narasi yang disesuaikan dengan hasil desk.
11. Penyampaian Laporan beserta Lampiran Formulir Evaluasi Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat tanggal **13 Agustus 2026** kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
12. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan formulir evaluasi yang diisi oleh Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah: **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**
S. Berryza Amanda, S.T.	**Agustian, S.E., M.Si.**